



Teladan dari Dyah Suminar

Oleh WINARTA

Pada 13 Agustus, secara terbuka, Dyah Suminar (DS)—istri Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto (HZ)—menyatakan tidak akan bersedia diajukan sebagai wali kota Yogyakarta dalam pemilu kepala daerah 2011. Alasannya, ia tidak mau dikatakan *numpang* nama suaminya yang seorang wali kota. Semoga saja DS benar-benar serius dan akan konsisten dengan sikapnya. Di tengah kehidupan politik yang semakin dipenuhi perburuan kekuasaan, kita miskin tokoh yang mampu menjadi teladan untuk memberikan kesegaran bagi kehidupan politik yang lebih beretika dan bermartabat.

Setidaknya DS masih mempunyai rasa malu atau sungkan dianggap *numpang* nama suami. Bisa saja DS menyangkal *numpang* nama suaminya dan berusaha memberi bukti adanya dukungan murni dari masyarakat ketika menyatakan kesediaan diajukan sebagai calon wali kota. Apalagi setiap warga negara yang memenuhi syarat memang berhak mencalonkan diri sebagai wali kota. Tidak ada larangan oleh hukum. Namun, DS tidak melakukan itu. Dalam bahasa sederhana, DS menyatakan tidak ingin dikatakan *numpang* nama. Namun, kita juga dapat memahaminya sebagai suatu pesan, dalam posisi sebagai istri wali kota, tidak etis jika ia mencalonkan sebagai wali kota melanjutkannya jabatan suaminya.

Dengan sikapnya seperti itu, DS telah memberikan kontribusi yang tinggi dalam membangun etika berpolitik. Posisi sebagai istri wali kota (kepala daerah) bukanlah posisi pengaderan dalam politik. Kalau kemudian seorang istri kepala daerah menjadi (semakin) populer, itu bukan menjadi tujuannya. Ia mungkin saja mendapat akses banyak untuk membangun jaringan ketika berkiprah terkait tugas-tugas suaminya. Atas semua fasilitas yang diterima itu, sah-sah saja kalau ada orang yang menyatakan, seorang istri kepala daerah terkenal karena

posisi suaminya. Oleh karena itu, pencalonan seorang istri kepala daerah bermasalah dari sisi etika politik. Tugas istri seorang kepala daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas suaminya, bukan mempersiapkan diri menggantikan suaminya sebagai kepala daerah.

Tulisan ini bukan untuk merendahkan kualitas perempuan. Tidak disangkal banyak perempuan sebelum menjadi istri kepala daerah sudah mempunyai pengalaman banyak dalam berorganisasi dan berpolitik. Mereka telah menunjukkan sebagai pribadi yang berkualitas. Pun ketika menjadi istri kepala daerah, mereka tetap mempunyai kegiatan mandiri di luar urusan pemerintahan dan tugas suaminya.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan mengajukan istri kepala daerah menjadi calon kepala daerah. Pertama, kemungkinan timbulnya dampak buruk terhadap proses pengaderan pemimpin yang telah dilakukan partai politik. Kalau praktik partai politik tidak melakukan pengaderan, setidaknya menimbulkan dampak negatif bagi regenerasi kepemimpinan di daerah. Kedua, perlu dihargai kiprah kader partai politik lainnya yang selama ini telah membangun karier di partai. Sangat mungkin hal ini menim-

bulkan kekecewaan para kader partai, meskipun sering kali terpaksa tidak dapat bersuara. Perlu juga mempertimbangkan memberikan kesempatan yang luas kepada calon-calon pemimpin potensial yang memang harus diberi kesempatan. Ketiga, sebaiknya istri kepala daerah dan keluarganya memang tidak ditradisikan sebagai "putra mahkota". Hal ini justru untuk melindungi istri kepala daerah dan keluarganya dari gunjingan dan kecurigaan politik akan memanfaatkan kesempatan selama suami/orangtuanya berkuasa untuk mencari keuntungan dalam rangka mencalonkan sebagai kepala daerah di kemudian hari.

nyukseskan terpilihnya istri atau keluarganya.

Ada kalanya partai politik memang lebih tergoa dengan popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) istri kepala daerah. Menurut saya, ini pemikiran yang tidak kreatif dan tidak strategis. Tugas partai politik adalah mempersiapkan dan mencari calon pemimpin untuk menjamin regenerasi kepemimpinan yang semakin berkualitas dan terbuka.

Partai politik perlu menghargai istri kepala daerah yang tidak bersedia dicalonkan karena merupakan sikap yang mulia. Justru partai politik akan mendapatkan nilai positif karena telah ikut serta menegakkan etika politik.

Mungkin DS ingin mengikuti kearifan Nelson Mandela. Nelson Mandela merasa cukup menjadi presiden Afrika Selatan untuk satu periode saja. Kalau ingin memperpanjang masa jabatannya ke periode kedua sangat mudahnya karena ketika itu popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi. Bujukan-bujukan partai dan orang-orang tidak mampu mengubah sikapnya. Baginya, prestasi seorang pemimpin bukan pada panjangnya masa jabatan, tetapi apa yang telah dilakukan kepada rakyatnya.

Dengan tidak mau memperpanjang masa jabatannya, Nelson Mandela sekaligus juga telah membuka kesempatan munculnya pemimpin baru. Untuk mendapatkan prestasi, DS tidak harus menjadi calon wali kota dalam waktu dekat ini. Kemauannya menjaga etika politik dengan menolak diajukan sebagai calon wali kota pada pilkada 2011 juga sebuah prestasi, bahkan mungkin jauh lebih berharga nilainya.

Semoga saja banyak muncul DS-DS yang lain di Indonesia.

WINARTA
 Deputi Direktur Independent
 Legal Aid Institute (ILAI)
 Yogyakarta

6

Untuk mendapatkan prestasi, DS tidak harus menjadi calon wali kota dalam waktu dekat ini. Kemauannya menjaga etika politik dengan menolak diajukan sebagai calon wali kota pada pilkada 2011 juga sebuah prestasi, bahkan mungkin jauh lebih berharga nilainya.

Sebaiknya, pencalonan istri atau keluarga kepala daerah sebagai kepala daerah menunggu jeda/selang satu periode setelah masa jabatan berikutnya. Hal ini akan menghilangkan kesan telah menumpang nama suami/orang tua. Sekaligus juga memberikan kegarahan terhadap berlangsungnya kompetisi calon kepala daerah yang mampu menghadirkan calon-calon potensial. Demikian juga kepala daerah tidak terbebani dengan upaya untuk me-

TP. PKK

✓ Positif

✓ Biasa

✓ Untuk diketahui

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. TP. PKK/ Dekranasda	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005